

**AKTUALISASI NILAI Keadilan Sosial dalam Pancasila
(Perspektif Nurcholish Madjid)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh :

NAMA : SOFIAN SYAH

NPM :1431010037

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS Ushuluddin dan Studi Agama
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**AKTUALISASI NILAI Keadilan Sosial dalam Pancasila
(Perspektif Nurcholish Madjid)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh :

NAMA : SOFIAN SYAH

NPM : 1431010037

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Pembimbing I : Dr. HIMYARI YUSUF, M. Hum

Pembimbing II : MUHAMMAD NUR, M. Hum

**FAKULTAS Ushuluddin dan Studi Agama
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

AKTUALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL PADA PANCASILA (PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID)

Oleh

SOFIAN SYAH

1431010037

Indonesia adalah negara hukum. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Sila ke lima dari pada Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh dari karya yang ditulis oleh Nurcholish Madjid, sedangkan data sekunder berupa data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan. Peneliti dalam mengolah data menggunakan teknik membaca pada tahap simbolik yaitu membaca yang dilakukan secara tidak menyeluruh terlebih dahulu, membaca pada tingkat semantik yaitu secara terinci, kemudian mencatat data pada kartu data secara *quotasi* dan secara *paraphrase*. Untuk mencapai penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode filsafat seperti metode: deskriptif, interpretasi, kesinambungan historis, heuristika, dan metode penyimpulan. Dengan metode ini diharapkan mengetahui makna yang terdapat dari keadilan sosial dalam Pancasila. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal: nilai keadilan sosial dalam Pancasila menurut Nurcholish Madjid yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan saling tolong-menolong. Dalam aktualisasi keadilan sosial di Indonesia yaitu untuk pemerataan dan keseimbangan di Indonesia. Sehingga dapat terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703278

PERSETUJUAN

Judul : Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila
(Perspektif Nurcholish Madjid)
Nama : Sofian Syah
Npm : 1431010037
Jurusan / Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Study Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin dan studi agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Himyari Yusuf, M.Hum

NIP. 196409111996031001

Pembimbing II

Muhammad Nur, M. Hum

NIP. 198104152011011005

Mengetahui

Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Dra. Yusafrida Rasyidin, M. Ag

NIP. 196008191993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **AKTUALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA (PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID)**, disusun oleh: **Sofian Syah, NPM: 1431010037**, Jurusan: **Aqidah dan Filsafat Islam**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, pada hari/tanggal: **Kamis, 15 Mei 2019**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Sudarman, M. Ag

(.....)

Sekretaris : Drs. A. Zaeny, M.Kom.I

(.....)

Penguji Utama : Prof. Dr. A. Fauzi Nurdin, M.S.

(.....)

Penguji I : Dr. Himyari Yusuf, M. Hum

(.....)

Penguji II : Muhammad Nur, M. Hum

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.c., M.Ag

NIP. 1958081231993031001

MOTTO

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ *

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua, bapak Mat. Ani dan Almarhumah ibu Emmilia yang saya sayangi dan saya hormati. Yang telah melahirkan, merawat dan mendidik saya sampai saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada istri saya tercinta Siti Nur Khafifa, yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, dan kepada anak saya Naila Ramadhania yang memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sofian Syah, lahir di Marga Kencana, 13 September 1995. putra dari pasangan bapak Mat. Ani dan almarhumah ibu Emmilia. Mempunyai tiga saudara kandung yaitu Hasepni, Yulisar dan Suhaiyah.

Riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, di Marga Kencana pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2002
2. SD Negeri 01 Marga Kencana, Marga Kencana pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008
3. SMP Negeri 1 Tulang Bawang Udik, Marga Kencana pda tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011
4. SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, Pulung Kencana pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin tahun 2014

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang tercurahkan Rahmat dan Ridha-Nya kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang berilmu, bermoral dan bermartabat. Sholawat serta salam yang tak hentinya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir, amin yarobal alamin.

Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial pada Pancasila (pespektif Nurcholish Madjid)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag.
3. Dr. Himyari Yusuf, M.Hum, selaku pembimbing I penyusunan skripsi ini yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan sehingga dapat terselesaikan.
4. Muhammad Nur, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan saran-saran penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna namun inilah hasil kerja keras secara maksimal penulis yang mampu berikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap karya tulis sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan mampu menjadi jembatan penghubung penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 26 Mei 2019

Penulis

Sofian Syah

NPM: 1431010037

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan terhadap makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : “Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila (perspektif Nurcholish Madjid)”. Dari rumusan judul ini, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut:

Aktualisasi berasal dari bahasa Inggris *actual* yang artinya benar-benar ada sehingga kata *aktualisasi* artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada.¹

Menurut Hasan Shadily, nilai adalah sifat-sifat, hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, nilai juga berarti tujuan dari kehendak manusia yang benar, juga berarti tingkat derajat yang diinginkan manusia.² Pendapat lain dikemukakan oleh Bambang Daroeso nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang.³

Keadilan sosial adalah salah satu jenis keadilan. Pada umumnya keadilan dibatasi sebagai memberi masing-masing haknya. Sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai manusia (hak asasi manusia) maupun sebagai masyarakat termasuk negara (hak-hak warga negara), sedangkan tujuannya ialah agar orang

¹PBDPN RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 427.

²Hasan Shadily, ct. Al, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1984, h. 239.

³Herimanto, Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 126.

masing-masing dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan tugas eksistensinya.⁴

Pancasila adalah lima dasar atau lima asas, yaitu dasar negara Indonesia. Dasar negara yang dimaksudkan adalah kelima sila yang terdapat dalam isi pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alenia ke 4, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia⁵

Selanjutnya Pancasila merupakan ideologi atau filsafat bangsa Indonesia dalam arti pandangan dunia. Sebagai suatu pandangan Indonesia, dengan kata lain filsafat, ia bersistem dan sila-sila Pancasila kait-mengait secara bulat. Kebulatan itu menunjukkan hakikat maknanya sedemikian rupa sehingga memenuhi bangunan filsafat Pancasila itu jika memang substansinya sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Isi jiwa inilah yang merupakan alat pengukur benar tidaknya isi yang di berikan itu benar-benar adalah filsafat Pancasila.⁶ Dalam kenyataannya unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dan telah melekat pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius, nilai-nilai tersebut

⁴Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), h. 24.

⁵Stephen L. Carter, *Integritas*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), h.10

⁶Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 71.

yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara diolah, dibahas dan kemudian disahkan oleh PKKI pada tanggal 18 Agustus 1945.⁷

Perspektif adalah sudut pandang dari mana sesuatu dilihat. Yaitu melakukan atau menggambarkan cara pandang atau sudut pandang.⁸

Nurcholish Madjid lahir di Mojoanyar, Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 dan beliau adalah staf Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Jakarta.⁹

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Isi Pancasila sangat penting dikaji karena mengandung makna filosofis yang masyarakat belum tahu jika tidak dikaji
2. Nurcholis Madjid membahas tentang keadilan sosial, keadilan sosial merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila yaitu sila kelima.
3. Keadilan sosial sudah memudar di dalam masyarakat, keadilan itu bersifat wajib yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an.

C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti memiliki sebuah ideologi. Sebuah pemikiran yang melandasi tata hidup dan pola pikir, sehingga tercipta keharmonisan dengan sesama. Semakin

⁷Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), h. 28

⁸Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: 2002), h. 834

⁹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 5.

tertata dan teraturnya pola hidup seseorang, akan semakin baik sistem hidup orang tersebut. Sebagai warga dari sebuah bangsa dan negara yang memiliki ideologi yang berasaskan Pancasila yang memiliki landasan yang kuat karena tersusun dari berbagai aspek dasar kehidupan. Pancasila yang memiliki sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah satu kunci yang berlandaskan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Menurut Ruslan Abdulgani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideology* (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenung jiwa yang mendalam kemudian dituangkan menjadi satu kesatuan.¹⁰

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik ataupun nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itulah yang mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan bahas nilai-nilai Pancasila sila ke-5.

¹⁰Heri Herdiawanto, dkk, *Cerdas, kritis & Aktif berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8

¹¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan Membahas Proses Reformasi*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999), h. 53

Namun dewasa ini sebagai bangsa yang berasaskan Pancasila, kita telah kehilangan sifat dasar dan makna yang sebenarnya dari Pancasila itu sendiri. Banyak sekali pergeseran yang telah terjadi di negara dan bangsa tercinta ini. Beberapa contoh signifikan telah terbukti dengan peristiwa - peristiwa yang telah mencoreng dan jauh dari asas Pancasila. Dalam hal ini salah satu sila dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Saat ini nilai-nilai yang tertanam di masyarakat terhadap sila tersebut sangatlah kecil, terlihat banyak sekali kerusuhan yang terjadi yang berawal dari hilangnya keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan¹², maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan *adl* (adil). Masyarakat menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil

¹²Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 80.

terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.¹³

Gambar lambang sila ke-5 padi dan kapas adalah nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.¹⁴ Dalam sila keadilan sosial tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi keadilan didalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan didalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.¹⁵

Keberagaman budaya yang menjadikan pergeseran nilai-nilai Pancasila terutama sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya yang dahulu berkembang yang selalu mengutamakan rasa keadilan sekarang mulai ditinggalkan, sehingga banyak masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada saat ini masyarakat Indonesia tidak lagi menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terbukti dengan timbulnya budaya

¹³Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), h. 96

¹⁴*Ibid.* h. 81

¹⁵*Op. Cit.*

KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), eksploitasi alam tanpa tanggung jawab karena hanya mementingkan keuntungan materi tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan yang akan merugikan orang banyak, seperti pembangunan yang tidak merata, tingkat kemiskinan semakin tinggi, semua terjadi akibat manusia yang tidak manusiawi. Manusia yang tidak menempatkan diri sebagaimana mestinya, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari sisi material dan mengabaikan sisi spiritual, manusia yang hanya mementingkan kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tanpa memperhatikan dan tanpa menyadari bahwa ada hak orang lain yang harus dihormati dan dijaga.

Didalam al-Qur'an bahwa sudah jelas bahwa manusia ataupun masyarakat harus berbuat adil yaitu dalam surat An-Nissa ayat 135 :

الْأَقْرَبِينَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَمْوَالَهُمْ عَلَىٰ وَلِيِّهِمْ شُحٌّ لِّبَالِغٍ فَسْطَقُوا مِمَّنْ كُونُوا أَمْوَالَهُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمْ
 نَّعَرِضُوا أَوْ تَلَوْا وَإِنْ تَعَدَّلُوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْدِيهِمْ أُولَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ يَكْرَهُ أَنْ
 خَيْرٌ أَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَاعِلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan bahwa tidak ada tatanan rendah tinggi dalam jabatan atau tidakkah meraka sama-sama ciptaan Allah, mengapa tidak menegakkan keadilan,

karena keadilan sangat penting untuk di tegakkan karena jika keadilan atau berbuat adil di tegakkan terciptanya rasa kenyamanan, ketentraman dan timbul rasa kebersamaan sesama masyarakat serta menuntaskan problematika sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, fokus persoalan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila?
2. Bagaimana aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.
2. Untuk mengetahui aktualisasi keadilan sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid.

Adapun penelitian dengan judul “Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila (Perspektif Nurcholish Madjid)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan sosial.
2. Bagi pembaca skripsi ini menjadi lebih dalam memaknai kehidupan yang sebenarnya sebagai warga negara berlandaskan Pancasila khususnya dalam sila ke-5 tentang keadilan sosial.

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, studi pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penyusun bahas.

1. Skripsi ditulis oleh Faqih Ulumi (13510052) jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Nilai-nilai Filosofis Pancasila menurut Nurcholish Madjid”* dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Nurcholish Madjid berpaku kepada nilai-nilai filosofis Pancasila dari sila pertama sampai kelima.
2. Skripsi ditulis oleh Nurdahlia (013010009) jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul *“Taqdir dalam pandangan Nurcholish Madjid”* dalam skripsi ini membahas tentang Taqdir.
3. Skripsi ditulis oleh Agus Defri Yanto (1231010091) jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul

“Keadilan Sosial perspektif Filsafat Hukum (study pemikiran Darji Darmodiharjo) dalam skripsi ini membahas tentang keadilan sosial perspektif filsafat Hukum menurut Darji Darmodiharjo sedangkan skripsi yang akan peneliti bahas mengenai Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid.

4. Skripsi ditulis oleh Muslihan (1031040006) jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul *“Eksistensi Partai Politik Islam Menurut Pandangan Nurcholish Madjid”* dalam skripsi ini membahas tentang Eksistensi Partai Politik menurut Nurcholish Madjid.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan.

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode penelitian, antara lain:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan(*library research*), yang tertumpu pada berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, surat kabar ataupun informasi yang diperoleh dari internet terkait dengan tema penelitian. Adapun sifat ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan berbagai masalah dan temuan secara cermat dan detail dengan menghubungkan berbagai data, sehingga di peroleh suatu gambaran yang jelas, akurat dan faktual sesuai dengan fokus penelitian.

Library research adalah mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari.¹⁶ Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, karena yang diteliti adalah pemikiran tokoh.¹⁷ Penelitian pustaka memiliki dua sumber yang menjadi rujukan kajian, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Data-data primer diambil sebagai objek material penelitian ini. Sedangkan data-data sekunder diambil dari data pustaka yang menunjang dan memperkuat (objek material dan objek formal), penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

¹⁶M. Ahmadi Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2

¹⁷Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 136.

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif filosofis yakni penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, segala kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang keadilan sosial dalam Pancasila dalam Nurcholish Madjid.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yaitu peneliti memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, segala kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah karya asli Nurcholish Madjid yaitu sebagai berikut:

1. Nurcholish Madjid yang berjudul *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)
2. Nurcholish Madjid yang berjudul *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2003)
3. Nurcholish Madjid yang berjudul *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008)
4. NurcholishMadjid, yang berjudul *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

5. Nurcholish Madjid, yang berjudul *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta, Paramadina, 2007)

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah diantara lain sebagai berikut:

1. Budhy Munawar Rahman, *Membaca Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011)
2. Hamka, *Keadilan sosial dalam islam*, (Depok, Gema Insani, 2015)
3. Kaelan, yang berjudul *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009)
4. Pimpinan MPR & Tim Kerja Sosialisasi MPR yang berjudul *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membaca pada tahap simbolik yakni membaca yang dilakukan secara tidak menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menangkap sinopsis dari isi buku, bab yang menyusunnya, sub bab sampai

pada bagian-bagian terkecil dalam buku.¹⁸Peneliti menangkap pemikiran dari Nurcholish Madjid melalui bab-bab penyusunnya hingga pada bagian yang menjelaskan tentang keadilan sosial dalam Pancasila.

- b. Membaca pada tingkat semantik yakni membaca secara terinci, terurai dan menangkap esensi dari kata tersebut.¹⁹Peneliti mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan sosial kemudian memahami maksud dan tujuannya.
- c. Mencatat data pada kartu data baik secara quotasi (mencatat data dari sumber data dengan mengutip langsung tanpa ada perubahan kata-kata), secara paraphrase (menangkap intisari data dan menuangkannya dalam bahasa peneliti), secara sinoptik (peneliti membuat ringkasan atau sinopsis) maupun secara precis (mengelompokkan berdasarkan kategori dan membuat ringkasan sinopsisnya).²⁰Peneliti mengutip buku tanpa mengubah kata-kata kemudian menangkap intisari dari pemikirannya dan menuangkan dalam bahasa peneliti.

4. Metode Analisa Data

Setelah peneliti mengumpulkan data-data yang telah dibutuhkan, dari data primer sampai data sekunder, maka langkah selanjutnya ditelaah

¹⁸Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paramadina, 2005), h. 157.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.* h. 160-161.

dan dianalisa. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa diantaranya:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk deskripsikan gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu. ²¹Dalam artian, akan dilakukan penggalian atas unsur-unsur yang mempengaruhi pemikirannya, baik lingkungan, agama, sosial, budaya maupun politik. Kemudian menganalisa kembali untuk menunjukkan dan memperjelas tentang aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila dalam perspektif Nurcholish Madjid.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik. ²²Penulis

²¹*Ibid*, h. 58.

²²Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisuis, 1989), h. 145.

menafsirkan berdasarkan data-data objektif yang telah dipahami, sehingga dengan demikian penulis mendapatkan hasil penelitian dengan yang objektif mengenai Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid.

c. Metode Kesenambungan Historis

Metode ini mendeskripsikan dan memaparkan objek material dalam suatu struktur sejarah yang terbuka bagi masa depan dalam dua arti. Dari satu pihak dapat menghasilkan interpretasi yang lebih produktif yaitu lebih bersifat objektif dan kritis. Dari lain pihak, naskah atau peristiwa dahulu memberikan penjelasan dan jawaban atas masalah saat ini. Dengan demikian ditemukan didalamnya makna dan arah yang tidak dimaksudkan oleh pengarang terdahulu. Sehingga naskah atau peristiwa yang lama tetap berharga, tetapi mendapat arti baru dan yang baru hanya diketahui berdasarkan yang lama.²³ Untuk memudahkan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan historis yang bersifat biografis dalam menemukan konsep-konsep keadilan sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid.

d. Metode Heuristika

Heuristika itu metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah.²⁴ Penggunaan unsur metodis

²³*Op. Cit.*h. 175

²⁴*Op. Cit.*h. 52

heuristika karena peneliti mengkaji mengenai relevansi nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang dijadikan pedoman hidup rakyat Indonesia.

e. Metode Penyimpulan

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat tentang Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid, maka peneliti menggunakan alur pemikiran lingkaran hermeneutik yakni suatu pola pemahaman dari hal induksi dan deduksi tidak dapat dikatakan mana yang terjadi lebih dahulu. Yang individual dari semula dipahami dengan dilatarbelakangi oleh ‘yang umum’, seakan-akan yang umum telah diketahui sebelumnya.²⁵ Maka antara induksi dan deduksi ada terdapat suatu lingkaran hermeneutik: dari umum ke khusus kemudian ke umum ke khusus dan seterusnya.

²⁵Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 45.

BAB II

KEADILAN SOSIAL DAN PANCASILA

A. Keadilan Sosial

1. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) mempertahankan hak dan masyarakat, keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat.¹

Menurut Darji Darmodiharjo keadilan yaitu kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya.²

Menurut Frans Magnis Suseno keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama.³ Menurut Gustav Radbruch keadilan berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.⁴ Menurut Plato keadilan yaitu hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.⁵

Dengan demikian keadilan mengatur hubungan antar manusia, oleh sebab itu dapat dikatakan tata hubungan antar manusia yang tepat.

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 8.

²Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 138.

³Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 45.

⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 163.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 47.

Sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat dan warga masyarakat, sedangkan tujuannya ialah agar orang masing-masing dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan panggilan hidupnya.⁶

Keadilan sosial menurut Jhon Rawl adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.⁷ Menurut Kirdi Dipoyudo Keadilan sosial adalah salah satu jenis keadilan. Pada umumnya keadilan dibatasi sebagai memberi masing-masing haknya. Sasarannya ialah hak-hak manusia sebagai manusia (hak asasi manusia) maupun sebagai masyarakat termasuk negara (hak-hak masyarakat dan negara) dan sebagai warga masyarakat atau negara (hak-hak warga negara), sedangkan tujuannya ialah agar orang masing-masing dapat menikmati hak-haknya secara aman dalam rangka pelaksanaan eksistensinya.⁸

Keadilan sosial adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antar manusia, maka harus dibahas terutama dalam konteks yang sosial sifatnya. Keadilan atau dalam pemahaman Rawls *fairness*, pada akhirnya memang tidak memiliki relevansi yang individual sifatnya. Persoalan tentang adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku manusia yang *ko-eksistensial*. Oleh sebab itu, aspek hubungan antar manusia yang syarat

⁶Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1985), h. 24.

⁷Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 4.

⁸*Op.Cit.*, h. 52.

dengan masalah keadilan membuatnya selalu peka untuk suatu tinjauan yang bersifat sosiologis.⁹

2. Hakikat Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmanidan rohani secara seimbang.¹⁰

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Disatu sisi pewujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Menurut Notonegoro, “silakelima: Keadilan sosial bagi seluruh

⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 150.

¹⁰Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 80.

rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.”¹¹

Secara lebih operasional perwujudan dari keadilan menurut Satjipto Rahardjoterkait dengan pendistribusian yang ada didalam masyarakat. Pendistrbusian ini tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik, antara lain: barang, jasa, modal usaha, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi kehidupan manusia.¹² Untuk itu cakupan hakikat dari keadilan, menurut Satjipto Raharjo meliputi:

- a. Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
- b. Memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum menjadi haknya;
- c. Kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya;
- d. Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang;
- e. Persamaan pribadi;
- f. Pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar kemakmurannya;
- g. Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran;
- h. Memberikan sesuatu secara layak.

¹¹*Ibid.* h. 81

¹²Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 56.

3. Kedudukan dan fungsi Keadilan Sosial

Setiap warga negara selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-dua bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹³

Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa keadilan sosial dalam negara Indonesia mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.

Tujuan keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, yaitu setiap orang mendapatkan kesempatan

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 67.

membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perwujudan keadilan sosial adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.¹⁴

Tujuan keadilan sosial menurut Hamka, dengan pendirian negara dan pemerintahan sebagai cara untuk mewujudkannya. Hal itu berarti untuk mendirikan masyarakatnya terlebih dahulu. Yang pertama ialah jiwa seseorang. Kemudian ditanamkan iman kepada Allah untuk menimbulkan rasa kasih sayang dan dermawan.¹⁵

Keadilan sosial yang Soekarno tawarkan sebagai salah satu sila dalam Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 juni 1945 tidak hanya mengutamakan kesetaraan politik, melainkan pula kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi yang dimaksud ialah kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.¹⁶ Maka untuk mewujudkan negara yang adil diperlukan partisipasi di bidang politik dan ekonomi.

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam

¹⁴Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 10-11.

¹⁵Hamka, *Keadilan sosial dalam Islam*, (Depok: Gema Insani, 2015), h. 15.

¹⁶Mohammad Hatta, *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 331.

bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- b. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peraturan di atas merupakan sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi merupakan paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepadakoperasi sosial lama; gotong royong. Cita-cita koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

Keadilan sosial, khususnya keadilan ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dilandasi oleh semangat ketuhanan, kemanusiaan nasionalisme, kerakyatan dan keadilan. Hal ini terwujud secara jelas pada karakteristik ekonomi Pancasila, yaitu koperasi (keseimbangan) dan egaliter (persamaan).

Fungsi keadilan sosial menurut Kirdi Dipoyudo ialah struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan semua warganya untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan. Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka itu berhak dan berwajib menuntut sumbangan kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara, semata-mata karena dia manusia, berhak atas taraf hidup minimum itu, dan negara sebagai persatuan orang-orang bertanggung jawab atas terwujudnya taraf minimum semua warganya.¹⁷

B. Pancasila

1. Pengertian Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui sebuah proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar falsafah negara, pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung didalamnya sudah ada dan berasal

¹⁷Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52-54.

dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius.¹⁸ Sidang panitia sembilan yang kemudian menghasilkan piagam Jakarta yang memuat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pertama kali.¹⁹ Kemudian dibahas lagi sampai pada akhirnya disempurnakan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Oleh karena itu memahami Pancasila secara jelas dan pengetahuan yang lengkap, maka diperlukan pejabaran dari pada pengertian Pancasila sebagai langkah awal untuk pembahasan berikutnya. Dengan demikian pengertian tersebut akan lebih mudah memahami Pancasila secara mendalam. Pengertian tersebut dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

- 1) Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta “Pancasila” memiliki dua macam arti yaitu:
 - a. Panca artinya lima dan sila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur.

53. ¹⁸Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), h.

24. ¹⁹Yayasan Pembela Tanah Air, *Sejarah lahirnya Pancasila*, (Jakarta: Yapeta, 1995), h.

b. Panca artinya lima dan sila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting.²⁰

2) Pancasila sebagai dasar negara diambil dari berbagai macam dan cerminan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu sebagai dasar negara Pancasila adalah asas moral yang sekaligus mengandung nilai-nilai etika untuk mengatur pola hidup bermasyarakat dan bernegara. Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut²¹:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sejarah Pancasila

Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya:

- a. Perumusan dari sidang BPUPKI pertama Dr. Radjiman Widyoningrat mengajukan permasalahan rumusan dasar negara

²⁰Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

²¹*Ibid.* h. 18.

Indonesia yang diisi tiga pembicara yaitu Mr. Moehammad Yamin, Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

- b. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.
- c. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
- d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan pada alinea IV terdapat rumusan lima prinsip dasar negara.²²

3. Hakikat Pancasila

Bicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis berarti terang, yakin, dan sebenarnya. Dalam filsafat, hakikat diartikan inti dari sesuatu, yang meskipun sifat-sifat yang melekat padanya dapat berubah-ubah, namun inti tersebut tetap lestari.

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya

²²Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 240.

merupakan suatu kesatuan. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lainnya.

Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia. Karena, manusia merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia.²³

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu,

²³Heri Herdiawanto dan Jumantha Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 10-13.

setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Negara Indonesia adalah suatu negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara.²⁴

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.²⁵

Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh

²⁴Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 45.

²⁵Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), h. 94.

karena teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah spiritual, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara.²⁶

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia merdeka yang berada pula lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip kebangsaan Indonesia adalah Internasionalisme yang berakar di dalam buminya Nasionalisme, dan Nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya Internasionalisme. Bahwa akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²⁷

Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggangrasa dan *tepa salira*, serta sikap

²⁶*Op. Cit.* h. 47.

²⁷*Ibid.* h. 51.

tidak semena-mena terhadap orang lain.²⁸Sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila Pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan.

Kemanusiaan berasal dari kata “manusia”, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.²⁹

²⁸*Op. Cit.*, h. 95.

²⁹*Op. Cit.*, h. 51-52.

c. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu.

Dengan sila Persatuan Indonesiamenempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentinganbangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.³⁰

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaraan atau perwakilan dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat

³⁰*Op. Cit.*, h. 95.

bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan.³¹ Masyarakat Indonesia sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak-haknya, menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerima dan melaksanakannya dengan baik dan rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat

³¹*Op. Cit.*, h. 68.

dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.³²

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan sesuatu kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum.³³

³²*Op. Cit.*, h. 96.

³³*Op. Cit.*, h. 97.

Prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial antara lain diatur dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian.³⁴

4. Kedudukan dan fungsi Pancasila

Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Oleh karena itu dalam menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidupnya maka masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila selalu mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara yaitu Pancasila.

³⁴*Op. Cit.*, h. 79.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang di anggap baik. Oleh karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.³⁵

b. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional yang mengatur negara

³⁵Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 1999), h. 57-60.

Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran.
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, (baik hukum negara tertulis maupun tidak tertulis).
- 4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggaraan negara termasuk para

penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

- 5) Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara Negara, pelaksana pemerintah termasuk penyelenggara pantai dan golongan fungsional.³⁶

c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila.

Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti: bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan

³⁶*Ibid.* h.60-62.

Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat.

Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tumbuh dan berkembang melalui dan dalam pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri dan melalui wakil-wakil bangsa dalam lembaga pembentuk negara dengan suatu kesepakatan serta perjanjian yang luhur diangkat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu ideologi Pancasila berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa itu sendiri sehingga antara Pancasila dengan bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang mutlak karena menyangkut kehidupan bangsa. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila merupakan sumber cita-cita, harapan nilai-nilai serta norma-norma yang dianggap baik, sehingga ideologi Pancasila pada hakikatnya demi kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.³⁷

Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu (1) Pancasila sebagai ideologi terbuka; (2) Pancasila sebagai *common platform*; dan (3) sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan.

³⁷*Ibid.* h. 62-64.

1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Menurut Nurcholish Madjid, Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi Indonesia. Walaupun demikian bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya operasional dan mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.³⁸

Pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ini perlu diapresiasi. Pemikiran semacam ini memiliki relevansi agar Pancasila tetap dipelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikat. Jika hal ini dilaksanakan secara optimal maka ideologi Pancasila tidak kehilangan konteks dan perannya. Ia akan terus komunikatif dan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, serupa dengan pemikiran Joko Siswanto, dapat memelihara makna dan relevansi Pancasila tanpa kehilangan hakikatnya. Hal ini penting ditegaskan karena apa yang dilakukan Nurcholish Madjid sesungguhnya agar Pancasila tidak “memfosil”.

³⁸Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 59-62.

Pancasila yang “memfossil” adalah Pancasila yang eksistensinya tidak lagi aktif dan fungsional layaknya fosil. Ia tidak lagi relevan dan kehilangan fungsinya yang operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterbukaan ideologi Pancasila bersifat internal dan eksternal. Keterbukaan ini sesungguhnya bersifat kultural, yakni selaras dengan kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa keterbukaan tersebut selaras dengan nilai dasar kemanusiaan yang merupakan inti kebudayaan. Keterbukaan tersebut dibentuk oleh adanya sifat dasar monodualistik atau kedwitunggalan mendasar antara personalitas dan sosialitas, antara ke-apa-an dan ke-siapa-an, antara dinamika dan keterbatasan, antara materialitas dan spiritualitas, antara kesinambungan dan pembaharuan.³⁹

Secara arif, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sikap kritis yang muncul dari sikap terbuka kepada sesama manusia dalam kedalaman jiwa yang saling menghargai merupakan indikasi adanya petunjuk dari Tuhan. Sikap semacam ini dinilai Nurcholish Madjid sebagai sikap yang sejalan dengan rasa ketuhanan atau takwa.⁴⁰

³⁹Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-ihwal Pancasila*, (Yogyakarta: Ladang kata, 2015), h. 59.

⁴⁰Nurcholish Madjid, *Islam, Dokrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kristis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 117.

Pancasila sebagai ideologi terbuka ternyata sama halnya dengan ideologi modern. Disebut ideologi modern karena Pancasila ditampilkan oleh para bapak pendiri bangsa yang berwawasan modern. Tujuan mereka menampilkan Pancasila adalah untuk memberi landasan filosofis bersama sebuah masyarakat plural yang modern.⁴¹

2. Pancasila sebagai *Common Platform*

Indonesia sebagai negara memiliki tingkat keanekaragaman tinggi. Bahkan Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling plural di dunia. Pluralitas ini mencakup berbagai aspek, mulai aspek agama, suku, ras dan golongan. Jika hal ini mampu dikelola secara baik maka akan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dikelola secara baik, cerdas, dan jujur.⁴²

Ada banyak cara mengelola keanekaragaman tersebut. Salah satunya adalah melalui pembangunan kesadaran bersama tentang pentingnya mencari titik temu dari keanekaragaman yang ada, bukan mempertentangkan titik beda. Kesadaran semacam ini penting untuk menumbuhkan harmoni sosial. Tanpa ada kesadaran, perbedaan hanya akan dilihat pada titik perbedaannya.

⁴¹Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 13-14.

⁴²Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 246.

Menurut Cak Nur, Pancasila merupakan *common platform* antarberbagai kelompok masyarakat dan agama. Konsep ini diadaptasi oleh Nurcholish Madjid dari tinjauan sejarah yaitu nabi dulu mewujudkan dalam Piagam Madinah. Menurut Nurcholish Madjid bahwa Pancasila merupakan pilihan umat Islam yang final, sah dan Islami. Tidak perlu lagi diperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan antara Islam dan Pancasila. Persoalan itu dinilai Nurcholish Madjid sudah tuntas. Agenda yang justru menjadi tantangan adalah bagaimana mengisi dan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara adil dan konsisten (*istiqomah*).⁴³

Menurut Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, haruslah dilihat Pancasila sebagai pemersatu dan kalimat *sawa'* yang mengajak semua orang agar patuh dengan ajaran Tuhan.⁴⁴ Dengan cara menghargai pluralitas yang sudah ada dimasyarakat, maka kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud.

3. Sila-sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan

Dalam sila pertama, misalnya yang menurut Bung Hatta merupakan sila utama yang menyinari sila-sila yang lainnya dinilai Nurcholish Madjid masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik secara konseptual maupun praktis. Padahal, sila pertama ini

⁴³Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2015), h. 9.

⁴⁴Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina, 2007), h. 67.

posisinya sangat sentral. Selain menyinari sila-sila lainnya, sila pertama ini juga menjadi dasar etis. Karena itulah merupakan hal tepat ketika Nurcholish Madjid menyebut sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila vertikal, sedangkan sila-sila selanjutnya merupakan sila horisontal.⁴⁵

Sila-sila yang lainnya masih menghadapi tantangan implementasi. Sila kedua masih harus berhadapan dengan realitas masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sila keempat masih berhadapan dengan rendahnya kualitas demokrasi, dan sila kelima masih harus berhadapan dengan belum terwujudnya keadilan sosial di berbagai wilayah.⁴⁶

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Cak Nur, salah satu sifat terpenting masyarakat yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ialah sikap adil dan menengahi, sehingga mampu menjadi saksi atas sekalian umat manusia. Maka, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab hanya ada dalam keadilan, dan hanya kemanusiaan yang adil yang mampu mendukung peradaban. Kemudian dalam sila Persatuan Indonesia, persatuan yang akan membawa kemajuan ialah persatuan yang dinamis, yaitu persatuan dalam kemajemukan, persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebab sekalipun

⁴⁵Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 83-84.

⁴⁶*Ibid.* h. 34-35

prinsip kemanusiaan adalah satu, terdapat kebhinnekaan dalam kesatuan itu. Karena keterbatasan manusia dalam memahami persoalan hidupnya sendiri dan masyarakatnya, diperlukan adanya saling *urun rembuk* atau musyawarah dalam suatu sistem yang memungkinkan *urun rembuk* itu sendiri, yaitu sistem yang memberi ruang untuk terjadinya tukar pikiran dan saling menyampaikan pesan tentang yang baik dan benar. Hal itu berguna untuk mewujudkan tujuan hidup bersama, yang harus diperjuangkan dengan penuh ketabahan, ketekunan, dan kerja keras. Lanjut Cak Nur, untuk mewujudkan masyarakat adil yang tidak ada penindasan oleh manusia atas manusia, dan yang bersemangat kerakyatan, diperlukan kebesaran tekad dan keteguhan jiwa yang luar biasa. Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yaitu taraf hidup mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan.⁴⁷

⁴⁷Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 77-80.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II KEADILAN SOSIAL DAN PANCASILA	
A. Keadilan Sosial	18
1. Pengertian Keadilan Sosial	18
2. Hakikat Keadilan Sosial	20
3. Kedudukan dan fungsi Keadilan Sosial	22
B. Pancasila	25
1. Pengertian Pancasila	25
2. Sejarah Pancasila	27
3. Hakikat Pancasila	28
4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila	36
BAB III MENGENAL NURCHOLISH MADJID	
A. Biografi Nurcholish Madjid	47
1. Latar Belakang Sosial	47
2. Latar Belakang Akademik	47
3. Latar Belakang Politik	49

B. Karya-karyanya	51
C. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan sosial dalam Pancasila.....	57

BAB IV NILAI DAN AKTUALISASI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA MENURUT NURCHOLISH MADJID

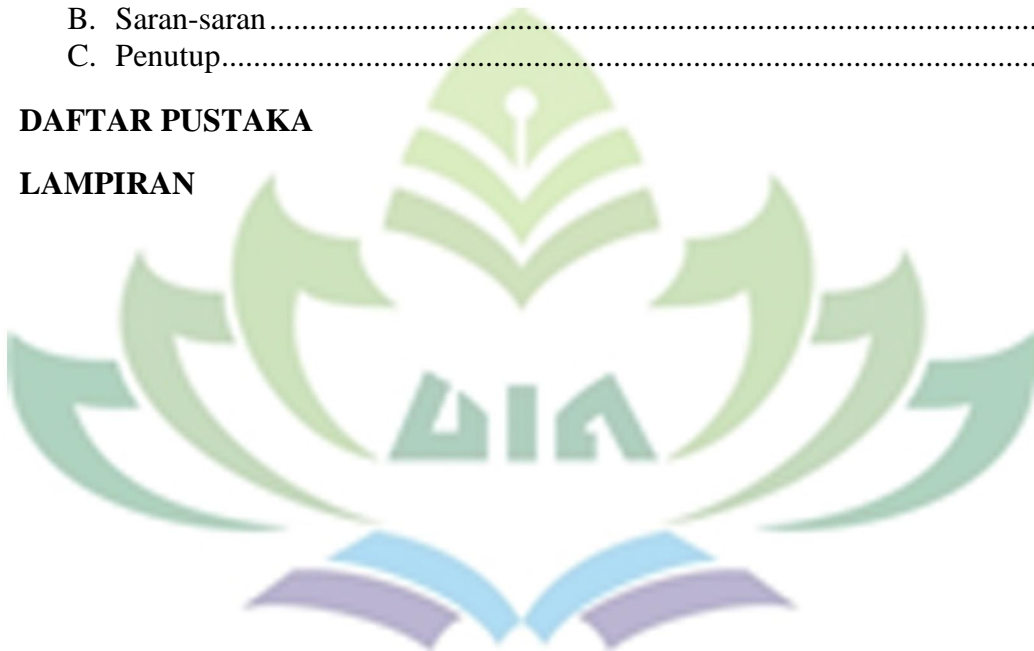
A. Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila	63
B. Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholish Madjid	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
C. Penutup.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB III

MENGENAL NURCHOLISH MADJID

A. Biografi Nurcholish Madjid

1. Latar Belakang Sosial

Nurcholish Madjid atau lebih dikenal dengan sebutan Cak Nur, dilahirkan di Mojoanyar Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharam 1358 H dari keluarga pesantren tradisional. Ayahnya bernama K.H. Abdul Madjid seorang ulama dan tokoh NU. Meskipun dekat dengan tokoh-tokoh NU seperti K.H. Hasyim Asy'ari namun secara politik ia lebih dekat dengan Masyumi.¹ Sedangkan ibunya bernama Fatonah adalah putri Kiai Abdullah Sadjad dari Kediri, Nurcholish Madjid mempunyai tiga orang adik.²

2. Latar Belakang Akademik

Nurcholish Madjid memulai pendidikannya ketika ia memasuki Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah.³ Dengan demikian Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan yaitu pendidikan dengan pola madrasah yang syarat penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukan, dan pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan

¹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 5

²Kuntowijoyo, dkk. *Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana* (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 18.

³Marwan Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), h. 3.

dasar Nurcholish Madjid sudah kelihatan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.⁴

Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke KMI (*Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah*) atau Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur dan selesai pada tahun 1960. Pondok Modern Gontor ini merupakan pondok yang sangat modern pada waktu itu. Setelah menyelesaikan sekolah di Gontor, Nurcholish Madjid melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan pada tahun 1968.⁵ dengan menulis skripsi “*Al-Qur'an Arabiyyun Lughatan Wa'alamiyun Ma'naan*”.⁶ Sejak tahun 1978, mendapat tugas belajar di Universitas Chicago (Chicago University City) Amerika Serikat (USA) dan tamat tahun 1984, dengan menulis disertasi berjudul “*Ibnu Taimiyah in Kalam and Falsafah; Problem of Reason and Relevation in Islam*” (Ibnu Taimiyah dalam Kalam dan filsafat; suatu Persoalan antara Akal dan Wahyu dalam Islam). Setelah menyelesaikan studi ia gencar melancarkan ide pembaharuan yang terkenal dengan Neo Modernisme yaitu: dengan corak gerakan apresiatif terhadap khazanah klasik dan terbuka terhadap pemikiran Barat.⁷

⁴Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 21

⁵Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 151.

⁶*Op. Cit.*, h. 24.

⁷Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 13.

Nurcholish Madjid juga dikenal sebagai salah seorang pendiri Yayasan Wakaf Paramadina, sebuah yayasan yang dikenal tempat orang-orang menengah kota berdiskusi masalah-masalah keagamaan. Di Paramadina inilah pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid menemukan tempat sosialisasinya, sehingga forum kuliah di Paramadina dikenal memiliki nuansa iklim demokratis, kritis dan analitis sekaligus mengakrabkan diri dengan persoalan-persoalan substansi. Melalui Paramadina inilah Nurcholish Madjid membangun cita-cita untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat madani.

Nurcholish pernah menjadi staf pengajar di IAIN pada tahun 1972-1974 serta memimpin umum majalah Mimbar dan pemimpin redaksi majalah forum. Nurcholish juga aktif di LIPI sebagai anggota staf peneliti, dan menjadi penulis tetap harian Pelita Jakarta tahun 1988.

3. Latar Belakang Politik

Pengembangan intelektualnya telah membuat Nurcholish Madjid dipercaya duduk sebagai aktivis pada organisasi ekstra mahasiswa yaitu Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sampai dua periode pada tahun 1966-1969 dan tahun 1969-1972. Nurcholish Madjid juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara, dan pernah menjadi Asisten Sekretaris Jendral *International Islamic Federation of Students Organization* (IFFSO). Disebabkan oleh pengalamannya itulah ide-ide segar Nurcholish Madjid muncul,

Nurcholish tidak segan-segan mengemukakan gagasannya baik dalam forum resmi intern mahasiswa maupun dalam pertemuan umum.⁸

Nurcholish dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan pemikiran Islam Indonesia pada dekade tahun 1970-an, bahkan beliaulah yang dinyatakan sebagai pencetus pembaharuan Pemikiran Islam. Itu dikarenakan pada pidatonya tanggal 2 Januari 1970 di Jakarta dalam acara yang diselenggarakan oleh organisasi HMI, PII (Pelajar Islam Indonesia), GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), dan PERSAMI (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia), pada waktu itu Cak Nur membawakan makalah yang berjudul *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*, itulah momentum yang dianggap sebagai pembaharuan pemikiran Islam Indonesia.⁹

Sejak tahun 1990-an, Nurcholish menduduki jabatan penting, antara lain Anggota MPR RI periode 1987-1992, dan periode 1992-1997, Anggota Dewan Pers Nasional, tahun 1990-1998, dan Ketua Dewan Pakar ICMI. Pada tahun 2003, Nurcholish pernah menjadi kandidat Presiden berpasangan dengan ketua umum partai Golkar, Akbar Tanjung.¹⁰

Kemudian, dorongan lain yang membuat pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid berwawasan luas adalah pergaulannya dengan Buya Hamka, kurang lebih lima tahun Nurcholish Madjid menjalin

⁸Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 152.

⁹*Ibid.*

¹⁰Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 300.

hubungandengan Buya Hamka dengan akrab saattinggal di Masjid Al-Azhar Kebayoran Jakarta. Nurcholish Madjid kagumkepada Buya Hamka yang dinilai mampu mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya dan semangat al-Qur'an sehingga dakwah dan paham ke-Islaman yang ditawarkan Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota.¹¹

B. Karya-karyanya

Nurcholish Madjid dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan produktif. Hal itu terbukti dengan banyaknya karya-karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun yang dibukukan dan lain-lain karyanya yang telah beredar dalam bentuk buku di pasaran Indonesia antara lain:

1. *Islam kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung : Mizan, 1987.

Buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan yang diterbitkan pada tahun 1987, merupakan tema sentral pembaharuan yang berisi tentang:

Pertama; Islam dan cita-cita politik Indonesia, yang menjadi inti pemikirannya disini adalah bahwa asa depan Indonesia dapat ditandai dengan munculnya konvergensi nasional diantara setiap anggota masyarakat demi terwujudnya pemerataan kesempatan sebagai penerapan dan demokrasi dan keadilan sosial yang berwawasan keterbukaan ideologi dan nilai keindonesiaan.

¹¹Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. vii.

Kedua; Islam dan cita-cita keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, dalam bidang ekonomi hendaknya ditopang oleh paham kesamaan manusia, yakni memberikan kesempatan yang sama dan tidak dibenarkan adanya sikap saling menindas antara sesama manusia, karena tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Ketiga, Islam dan Masyarakat Modern Industri, industri membawa dampak kepada terciptanya masyarakat yang lebih mementingkan segi keahlian serta menimbulkan suatu ketundukkan masyarakat pada sistem birokrasi, hal ini menimbulkan hilangnya kebebasan seseorang karena semuanya telah diatur dengan pasti. Sebagai akibat dari proses industrialisasi tersebut nilai-nilai kemanusiaan menjadi hilang.

Keempat; modernisme dan ide pembaharuan pemikiran Islam, modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan bekerja guna kebahagiaan umat manusia, ditambahkannya bahwa modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah dan sunnatullah, sehingga agar dapat menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku di alam. Dari pemahaman tersebut akan melahirkan ilmu pengetahuan.

Kelima; Islam dan Ilmu Pengetahuan, bahwa manusia sebagai khalifah Allah di dunia ini diberikan-Nya kelebihan berupa ilmu pengetahuan. Usaha manusia untuk memahami sunnatullah akan melahirkan ilmu pengetahuan, hal ini merupakan ketundukkan Allah,

karena Ilmu pengetahuan berawal dari Allah dan harus digunakan dalam mengabdikan kepada-Nya.

Keenam; prospek Islam, bahwa setiap muslim harus mampu menjawab tantangan moral al-Qur'an dengan segala implikasinya.¹²

2. *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan : pikiran-pikiran Nurcholish Madjid "Muda"* (1994).

Buku ini berisi esai-esai Nurcholish Madjid saat muda yang menyangkut beragam topik sosial; dari rambut gondrong, judi, tanah, hingga pak haji komunis.

3. *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (1994)

Buku ini menjelaskan perihal banyak isu keagamaan. Secara metaforik merupakan ragam pintu menemui-Nya.

4. *Khazanah Intelektual Islam* (1983)

Dalam buku ini dijelaskan tentang salah satu segi kejayaan Islam dibidang pemikiran, khususnya yang berkenaan dengan filsafat dan teologi. Lebih lanjut dalam buku ini memperkenalkan sarjana-sarjana muslim antara lain; al-Kindi, al-Farabi, al-Asy'ari, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh.

¹²Nurcholish Madjid, *Islam dan Kemodernan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 9-10.

5. *Islam Doktrin dan Peradaban: Telah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (1992).

Dalam buku ini kumpulan makalah yang di tulis Nurcholish Madjid pasca studi di Chicago. Buku ini merupakan karya monumental dan menghadirkan ajaran Islam yang adil, inklusif dan kosmopolit. Didalam bukunya terungkap gagasan-gagasan dibawah tema tauhid dan emansipasi harkat manusia, disiplin ilmu keislaman tradisional, membangun etika masyarakat serta universal Islam dan kemodernan.

6. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (1995).

Pemikiran Nurcholish Madjid dalam buku ini merupakan analisis dan refleksi terhadap wacana keislaman secara mendasar. Nurcholish Madjid dalam buku ini membahas tema-tema pokok ajaran Islam yang telah berkembang.

7. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (1997)

Buku ini terdiri dari lima bab, bagian pertama: yaitu kajian ilmiah terhadap Islam di Indonesia, bagian kedua: peran umat Islam Indonesia menyongsong era tinggal landas, bagian ketiga: dimensi sosial budaya pembangunan di Indonesia, bagian ke empat: demokrasi di Indonesia dan bagian ke lima: pelaksanaan Pancasila dan demokrasi untuk mewujudkan ketahanan nasional.

8. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. (1995)

Dalam buku ini menyajikannya dengan wawasan yang lebih kosmopolit dan universal mementingkan warna dan corak pemikiran keagamaan yang bersifat lokal dan partikular.

9. *Bilik-bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan* (1997)

Buku ini memuat deskripsi dunia pesantren dengan segala dinamika perkembangannya, berhadapan dengan wacana modernisasi. Menurut Cak Nur pesantren harus mengusahakan perubahan agar bisa mengejar ketertinggalan.

10. *Kaki Langit Peradaban Islam* (1997)

Buku ini merupakan suntingan berbagai kumpulan makalah Nurcholish Madjid yang berisi tiga bab. Pertama menengahkan wawasan peradaban Islam. Kedua, menjelaskan pemikiran-pemikiran para tokoh muslim, antara lain asy-Syafi'i dalam bidang hukum Islam, al- Ghazali dalam bidang tasawwuf Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat, sejarah dan sosial. Dan ketiga, mengenai dunia Islam dan dinamika global.

11. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*(1998)

Dalam buku ini merupakan kumpulan wawancara yang telah dimuat dalam berbagai media massa sekitar tahun 1970 sampai 1996,

dengan tema sangat beragam dan spontan, meliputi berbagai persoalan aktual; politik, budaya, pendidikan sampai peristiwa 27 juli.

12. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*(1999)

Dalam buku ini lebih menjelaskan pada gagasan-gagasan transformasi nilai-nilai al-Qur'an dalam mewujudkan masyarakat madani, istilah yang sekarang makin populer dalam wacana nasional bangsa.

13. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (2000)

Buku ini merupakan kumpulan ceramah haji dan umrah. Nurcholish Madjid menilai haji adalah perilaku religius atas perintah Tuhan dan napak tilas perjalanan hamba-hamba Allah yang suci.

14. *Masyarakat Religius* (2000).

Buku masyarakat religius ini memperkenalkan Islam dan konsep kemasyarakatan, komitmen pribadi dan sosial, konsep keluarga muslim, konsep media dan kesehatan keluarga muslim, serta konsep mengenai eskatologi dan kekuatan supra alami.

15. *Indonesia Kita*(2004)

Buku ini dilatarbelakangi perenungan akan kondisi saat ini, yang dengan seksama menggali akar historis bangsa, dengan visi yang tajam untuk perkembangannya. Pemaparan diawali tinjauan historis pra-imperialisme Barat hingga situasi bangsa kontemporer, dan ditutup dengan menyajikan tawaran solusi untuk kehidupan bangsa yang lebih baik, yang dituangkan dalam sepuluh butir *platform* membangun kembali Indonesia.

C. Pokok-pokok Pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan sosial dalam Pancasila

Dalam kehidupan negara Indonesia, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan Indonesia. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” merupakan tujuan negara Indonesia.¹³ Penegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan bagi yang melaksanakan dan yang melanggar akan mendapatkan malapetaka dan dihancurkan Tuhan.¹⁴

Cak Nur menyoroti masalah keadilan sosial dalam Islam dapat dijumpai dalam al-Qur'an pada ayat-ayat Makkiyah. Secara terang-terangan, al-Qur'an mengutuk individu dan masyarakat yang anti-keadilan, dengan sistem ekonomi yang tidak produktif dan egois.¹⁵ Keadilan sosial sejalan dengan egalitarianisme radikal sebagai konsekuensi agama monoteis. Seperti diketahui, dalam agama monoteis, keadilan merupakan misi profetik (tugas suci para nabi). Seperti dikatakan dalam al-Qur'an, “Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul. Maka

¹³Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 506.

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2007), h. 184.

¹⁵Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 126.

jika rasul mereka telah datang, dibuatlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim”.¹⁶

Kitab Suci al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan “adil” (*‘adl*), untuk makna “keadilan” dengan berbagai nuansanya itu, Kitab Suci al-Qur'an juga menggunakan perkataan “*qist*” dan “*wash*”. Para ahli tafsir juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata “*mizan*” ke dalam pengertian “*adl*”. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar “sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur”.¹⁷

Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan “adil” dan “keadilan” dalam ajaran agama Islam. Cak Nur mengutip pemikiran Murtadha al-Muthahhari tentang adil dan keadilan. Terdapat empat pokok pemikiran tentang adil dan keadilan:¹⁸

Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), jika suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian yang sama maka kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama. Kesatuan tersebut akan mampu untuk mempertahankan diri dan untuk memberi efek yang diharapkan. Jika suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'adil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran yang tepat. Jadi itulah keadilan (*‘adl*) dalam

¹⁶Budhy Munawar Rahman, *Membaca Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 186.

¹⁷Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 506.

¹⁸*Ibid.* h. 509-512.

pengertian keseimbangan (*mizan*). Menurut al-Muthahhari, keadilan dalam makna keseimbangan itu, berlaku terutama untuk kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya.

Kedua, menurut al-Muthahhari, keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tetapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan orang lain, misalnya, seorang manager diperlakukan sama persis dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justru kezhaliman. Tetapi jika yang dimaksud ialah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas dan fungsi yang sama), maka pengertian sebagai makna keadilan dapat diterapkan.

Ketiga, pengertian tentang keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan ‘penunaian hak kepada siapa saja yang berhak’. Maka kezhaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak.

Menurut al-Muthahhari, keadilan dalam arti pemberian hak kepada yang itu menyangkut dua hal:

1. Masalah hak dan pemilikan (*rights and properties*) ini tidak saja mencakup hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak dan pemilikan alami, misalnya, hak bayi untuk mendapat susuan ibunya, yang berkenaan dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhannya.
2. Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain dari memenuhi kualitas hidupnya adalah kezhaliman. Jadi, pemberian hak yang tepat kepada yang membutuhkan, misalnya, orang yang haus seharusnya diberikan air, jika diberikan nasi maka tidaklah sesuai.

Selanjutnya, makna keadilan yang keempat dalam pembahasan al-Muthhari ialah Keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada hambanya untuk menuju ke arah kesempurnaan, sesuai dengan makna al-Qur'an surat al-Fushilat ayat 46:

﴿لِّلْعَبِيدِ بِظُلْمِ رَبِّكَ وَمَا فَعَلِيَهَا أَسَاءَ وَمَنْ فَلِنَفْسِهِ ۖ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya”.

Jika ingin mencapai masyarakat yang berkeadilan, salah satu urgensi yang harus diperjuangkan adalah meningkatkan kesadaran berkenaan dengan hak-hak manusia yang sah, baik menurut universal maupun secara ketentuan

kenegaraan.¹⁹Dalam keadilan sosial terdapat kata “seluruh rakyat Indonesia” berarti setiap warga negara Indonesia baik yang tinggal di NKRI maupun yang tinggal di negara-negara lain harus merasakan perlakuan yang sama (adil). Dan kata “sosial” berarti tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila menurut Nurcholish Madjid yaitu mementingkan hak manusia sebagaimana mestinya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan sila ke lima ini, masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila ke lima ini terkadang belum sesuai yang diharapkan. Hal ini akan berubahnya sikap masyarakat Indonesia. Pancasila perlu diteladankan, bukan sekedar dibelajarkan. Oleh sebab itu, penting sekali ditanamkan sejak dini tentang Pancasila.

Penulis sependapat dengan pemikiran Nurcholish Madjid bahwa dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus bertujuan mensejahterakan rakyat. Di Indonesia saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Seperti halnya tempat pendidikan dan ruang terbuka yang beralih fungsi menjadi tempat bisnis, pengusaha kecil menjadi tersudut oleh pemodal-pemodal asing.

Menurut pendapat para tokoh tentang mengaktualisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat perbedaan cara pandang tetapi memiliki

¹⁹Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 99.

satu tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan bersama. Maka dengan cara pandang apapun, pemerintah harus bekerja keras dalam pengembangan sumberdaya alam yang ada maupun sumberdaya manusia untuk bangsa Indonesia. Peran masyarakat dan pemerintah keduanya berkaitan untuk menuju keadilan tersebut. Kepedulian pemerintah kepada rakyat akan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.



BAB IV

NILAI DAN AKTUALISASI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID

A. Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai sila kelima menurut Nurcholish Madjid dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Memiliki dasar moral yang kuat

Sosialisme tidak hanya kemanusiaan saja tetapi juga ketuhanan. Dengan sosialisme religius berarti tidak hanya memikirkan kebahagiaan di dunia saja tetapi juga dalam kehidupan lebih kekal di akhirat. Karena dasar moral yang kuat itu, di harapkan tidak mudah terjerumus dalam lembah metode kerja yang menghalalkan segala macam cara.¹

b. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam hal ini masyarakat dapat merasakan keadilan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak pilih kasih, dan memberikan setiap orang yang berhak sebagaimana layak didapatkannya. Dan ini dapat

¹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 134..

dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan seperti, politik, ekonomi, kebudayaan, akademik, dan hukum.²kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia.

c. Tidak bersikap boros

Dalam hal ini masyarakat Indonesia di harapkan tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. Karena hidup boros dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum.³

d. Tidak menumpuk harta atau bergaya hidup mewah

Masyarakat Indonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan ialah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menyosialisasikan harta yang dicintainya.⁴

e. Suka bekerja keras

Untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir, sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha diiringi doa. Untuk menjaga cara kerja yang konsisten dan rajin serta

²Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 246.

³Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 137

⁴*Ibid.*

mewujudkan tujuan-tujuan produksi jangka panjang terciptalah kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang.⁵

B. Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila perspektif Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah salah seorang intelektual Islam Indonesia yang memiliki perhatian serius terhadap berbagai persoalan. Luasnya perhatian tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang intelektual mumpuni. Wawasan sangat luas, bacaannya menembus batas-batas agama dan geografis.

Menurut Nurcholish, keadilan dalam al-Qur'an dinyatakan dengan istilah-istilah '*adl dan qisth*'. Pengertian adil dalam al-Qur'an juga terkait dengan sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*), dalam semangat modernisasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah *wasath* (pertengahan). Pengertian *Wasath* sebagai sikap seimbang antara dua ekstermitas serta realistis, dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia menolak kemewahan maupun asketisme berlebihan.⁶

Keadilan berdasarkan iman, menurut Cak Nur, juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan amanat (titipan suci Tuhan) kepada umat manusia untuk sesamanya, khususnya amanat berkenaan dengan kekuasaan memerintah. Menurut Cak Nur, kekuasaan memerintah adalah sesuatu yang tak terhindarkan demi ketertiban tatanan kehidupan manusia sendiri. Setiap bentuk kekuasaan

⁵Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 156.

⁶Budhy Munawar Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 186-187.

adalah kepatuhan orang banyak pada para penguasa. Namun harus mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan. Menurut Hamka, berdirinya pemerintahan adalah untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap masyarakatnya. Kemerdekaan yang sehat memiliki hak dan kewajiban, keadilan haruslah benar-benar ditegakkan oleh pemerintah.⁷

Iman kepada Allah pada dasarnya, mempunyai implikasi dan efek menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban amanat Illahi menyatakan diri keluar dalam sikap-sikap terbuka, percaya kepada diri sendiri, karena bersandar pada sikap tawakal kepada Tuhan dan karena ketentraman yang diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya.

Salah satu wujud nyata iman itu menurut Cak Nur adalah sikap tidak memutlakkan sesama manusia karena akan menimbulkan syirik. Sehingga tidak ada alasan untuk takut kepada sesama manusia. Menurut Cak Nur, kesadaran sebagai sesama manusia akan menumbuhkan pada pribadi rasa saling menghargai dan menghormati, yang berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan pendirian sendiri. Korelasi pandangan hidup tersebut, adalah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesendirian tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang autentik, kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik.⁸

Menurut Cak Nur, ketimpangan sosial yang ada di Indonesia saat ini yaitu berkaitan dengan krisis nasional yang berpangkal dari persoalan KKN. Adalah KKN itu yang pertama-tama menjadi sebab ketimpangan pembagian kembali

⁷Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Depok: Gema Insani, 2015), h. 38.

⁸*Ibid.* h. 187-188.

kekayaan nasional pada tingkat pribadi, kelompok maupun daerah. Pemerintahan yang bersih merupakan prasarana paling penting bagi terwujudnya keadilan sosial. Fungsi pemerintahan menurut Cak Nur ialah bertanggung jawab memperhatikan nasib rakyat miskin, memelas, dan tak berdaya. Sebab, masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anggotanya, dan karenanya harus menyediakan suatu perlindungan tertentu terhadap resiko rakyat kecil untuk melawannya.

Selain pemberantasan total KKN sebagai pangkal tolak utama, keadilan sosial di Indonesia sekarang pertama-tama memerlukan pemikiran serius tentang menyediakan upah penyelamatan (*relief payments*) kepada yang memerlukan. Kedua, pemerintah juga dituntut untuk memberi subsidi dan mengatur organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para pekerja. Ketiga, menciptakan suatu sistem asuransi oleh pemerintah yang bersifat wajib.

Secara lebih ringkas, penciptaan keadilan sosial adalah sejajar dengan pengertian negara sejahtera (*welfare state*), yang menuntut tersedianya standar hidup minimal untuk setiap warga negara. Penciptaan keadilan sosial di Indonesia sangat relevan karena sedang bergerak menjadi negara industri. Individualisasi akibat ekonomi industri harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar, khususnya untuk membantu pengangguran, orang sakit dan lansia (lanjut usia).⁹

Selanjutnya, menurut Cak Nur, wujud paling nyata dari dilema pertumbuhan dan keadilan itu dapat dirasakan dibalik kenyataan yang hanya

⁹Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 168-171.

terpusat di kota-kota besar khususnya modal, keahlian dan informasi (teknologi). Konsentrasi modal, tenaga kerja, dan informasi di tempat-tempat tertentu di Indonesia merupakan suatu ketimpangan sosial. Pembangunan nasional di Indonesia memberi tekanan kuat pada bidang ekonomi¹⁰.

Menurut Cak Nur, tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan tidak ada kutukan Kitab Suci yang lebih keras daripada kutukan kepada para pelaku ekonomi yang tidak adil.¹¹ Seperti firman Allah surat at-Taubah ayat 34-35.

بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْوَالٌ لِّيَاكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِمَّنْ كَثِيرٌ إِنَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمْ
سَبِيلٌ فِي يَنْفِقُونَهَا وَلَا تَلْفُضُهَا لِيَكُنْزُومَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ
نُوبِهِمْ جَبَاهُهُمْ يَفْتَكُونَ جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا تُحْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ
تَكُنْزُومَ كُنْتُمْ مَا فُذِّقُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ كُنْتُمْ مَا هَذَا وَظَهُورُهُمْ وَجْهٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”,

“pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu

¹⁰Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 151.

¹¹Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 128.

dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Dalam aktualisasi keadilan sosial menurut Cak Nur, diperlukan keserasian dan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat yang dikehendaki oleh Indonesia itu didasarkan kepada adanya kewajiban untuk menolong golongan tidak mampu atau dalam ungkapan lain pemihakan kepada kaum tertindas. Yang biasa ditunjuk sebagai bentuk formal kewajiban itu ialah membayar zakat. Banyak penegasan dalam Kitab Suci tentang hak kaum miskin itu antara lain seperti dikatakan dalam al-Qur-an surat al-israa' ayat 26:

﴿تَبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ لَا لِلْسَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ﴾

Artinya: *"dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros"*.

Kemudian Surat adz-Dzariyat ayat 19:

﴿وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta).*

Dan Surat al-Baqarah ayat 267:

وَأُولَ الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا مِمَّا آتَيْنَا بِهَا
مِيدُ غَنَى اللَّهِ أَنَّ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنَّ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Maka penunaian hak untuk mereka yang berhak dinyatakan dalam perintah wajib membayarkan zakat, dan dilengkapi serta disempurnakan dalam anjuran kuat untuk berderma di luar zakat.¹² Orang yang senang memberi atau berderma memiliki nilai kemanusiaan yang amat tinggi dan terhormat, tidak saja dihadapan manusia, tetapi juga dihadapan Allah SWT. Dalam aktualisasinya perlu adanya pengawasan dari pemerintah untuk prosesnya. Karena seringkali terjadi kecurangan yang terjadi dalam hal penyaluran bantuan atau zakat tersebut.

Menurut Nurcholish, diperlukan juga pola penggunaan kekayaan yang mencerminkan keadilan. Maka pengawasan kekayaan negara harus dilakukan secara tegas, disertai penyadaran bahwa transaksi yang mengandung *conflict of interest* adalah jenis kejahatan korupsi.¹³ Cak Nur memulai dengan mengelaborasi dengan menjelaskan makna adil. Adil berarti sesuatu yang sedang, seimbang,

¹²Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 515-517.

¹³Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 120.

wajar. Begitu pula kata *just* yang bermakna wajar, *justice* (keadilan) ialah kewajaran. Pola penggunaan kekayaan yang memenuhi kewajaran adalah suatu keadaan yang dapat diterima oleh semua orang dengan penuh kesukarelaan dan kelegaan. Pola tersebut ialah pola prihatin. Dalam kepribadian dan keprihatinan terhadap unsur dan semangat solidaritas sosial, suatu sikap yang selalu memperhitungkan dan memperhatikan keadaan kepentingan orang banyak; tidak egois atau berpusat pada diri sendiri. Dengan keprihatinan, harta yang digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, tak lebih dan tak kurang menyisihkan sebagian untuk mendorong produktivitas umpamanya, dengan sistem tabungan, dan mengeluarkan sebagian lagi untuk kepentingan langsung sosial. Dengan menekan penampakan mencolok kekayaan, satu lagi hal didapat: mengurangi sumber ketegangan-ketegangan sosial yang amat berbahaya. Cak Nur merujuk penjelasan tersebut kepada Q.S. al-Furqan (25): 67.¹⁴

﴿قَوْمًا ذَلِيلًا لِّكَ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُحْسِرُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Untuk mewujudkan keadilan sosial perlu ketegasan memperhatikan hidup rakyat secara nyata. Untuk itu pembangunan ekonomi harus diubah karena membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang melimpah di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 141-144.

sumberdaya alam seharusnya tidak bergantung pada pihak asing yang akan mengganggu kedaulatan bangsa. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola untuk mensejahterakan rakyat Indonesia bukan untuk diserahkan kepada pihak asing.¹⁵

Dengan meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, maka rakyat Indonesia akan mampu mengelola kekayaan yang dimiliki oleh bangsa untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling penting untuk meratakan dan menyamakan tingkat mutu sumber daya manusia bangsa, oleh sebab itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih kepada daerah-daerah terpencil dan terisolasi dalam usaha pemerataan pendidikan nasional.¹⁶

Dengan aktualisasi keadilan sosial diharapkan Pemerintah dan masyarakat dapat mengelola kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat, memberi kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Mengembangkan semangat tolong-menolong dengan membantu yang lemah dan golongan kecil.

Dalam perwujudannya dapat dilakukan dengan usaha pengupayaan modal, perbaikan jalan raya sebagai akses penghubung, adanya pelatihan untuk

¹⁵ NurcholishMadjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 198.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Indonesia kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 155.

memperoleh keahlian, menyalurkan aliran listrik ke daerah-daerah terpencil, dan lainnya.

Dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlunya kemampuan untuk menggunakan sumber daya alam secara produktif dan adil. Maka suatu daerah akan sukses jika ada daya serap yang tinggi terhadap sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan dengan baik.

Kesehatan terkait erat sekali dengan masalah pendidikan. Pada hakikatnya, pengembangan kesehatan, baik pada tingkat pribadi maupun tingkat masyarakat merupakan jenis pendidikan juga, yaitu pendidikan jasmani. Sebab pendidikan tidak hanya kepada peningkatan kemampuan intelektualnya saja tetapi juga peningkatan kemampuan jasmaninya juga. Untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia yaitu dengan usaha memperbaiki seluruh warga negara, dengan melakukan penelitian tentang sebab suatu jenis penyakit dan cara pengobatannya, dan menjamin kebersihan dan keselamatan dalam makanan, obat-obatan, kosmetika dan produk-produk lain yang dikonsumsi masyarakat.

Salah satu yang amat penting yaitu kesadaran tentang betapa pentingnya memelihara alam lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup harus melibatkan usaha penyadaran tentang harga tak ternilai dari alam sebagai anugerah Tuhan. Bumi merupakan ciptaan Tuhan untuk di pelihara seluruh umat manusia. Melalui pendidikan lingkungan ini masyarakat akan lebih memahami tentang pentingnya menjaga alam sekitar agar tidak rusak. Karena dapat merugikan diri sendiri dan seluruh umat manusia.

Ketidakadilan di Indonesia saat ini dapat dilihat pada sistem pengadilan. Seperti halnya mata uang, hakim memiliki dua sisi yang berbeda tetapi muncul pada waktu yang bersamaan. Sistem hukum yang adil dalam dilihat dalam sistem pengadilannya. Keadilan yang seharusnya diungkapkan dengan perlakuan yang sama terhadap para pihak di pengadilan belum mencapai tujuan. Keadilan ditegakkan bukan berdasarkan moral yang mempengaruhi masyarakatnya. Banyaknya kasus di masyarakat yang memperlihatkan ketidakadilan tersebut, antara lain putusan hakim yang dibuat secara tidak adil dengan pertimbangan yang berat sebelah karena hakim tidak memiliki waktu untuk mendalami perkara sehingga ia hanya memilih argumen pengacara pihak yang di menangkan, putusan hakim yang memberatkan si miskin karena ia tidak dapat membela diri karena keadaan ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus bersikap adil dengan tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu, status, jabatan ataupun pangkat seseorang. Selalu menjunjung tinggi makna keadilan dalam bidang hukum dengan sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sila keadilan sosial ini pada intinya bahwa adanya persamaan manusia didalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriyah dan batiniyah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pengalamannya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pameran terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan kepentingan umum.
2. Dalam Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Menurut Nurcholish Madjid, adanya keserasian antara pribadi dan masyarakat untuk saling tolong-menolong. Dalam hal ini bentuk menolong sesama yaitu dengan kewajiban membayar zakat. Kemudian setelah berzakat, anjuran lain yaitu berderma. Aktualisasi dalam penggunaan kekayaan menurut Cak Nur yaitu dengan sewajarnya karena akan diterima oleh masyarakat dengan sukarela

dan kelegaan. Kemudian dengan pola keprihatinan, harta yang digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, tak lebih dan tak kurang menyisihkan sebagian untuk mendorong produktivitas untuk kepentingan langsung sosial. Disamping itu di perlukan pula pengawasan serius terhadap penyaluran dana bantuan tersebut. Dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan mampu mensejahterakan rakyat demi terwujudnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

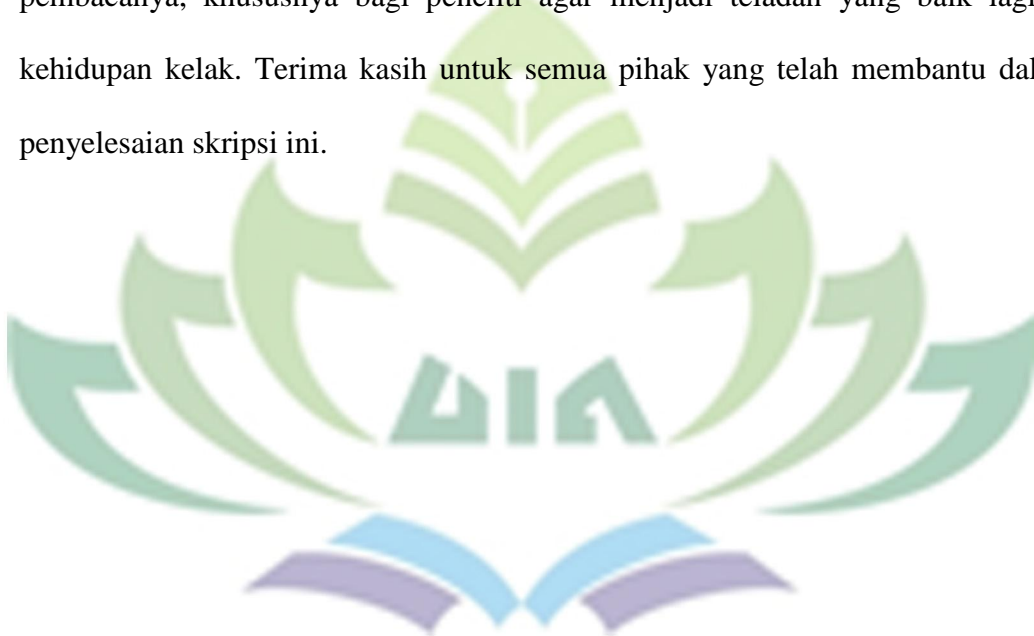
B. Saran-saran

- a. Pemikiran Nurcholish Madjid sangat relevan pada konteks kebergamaan di Indonesia. Sebab Pancasila adalah sebuah ideologi bersama (*common platform*), yang merupakan prinsip-prinsip yang menjadi titik temu dan persamaan antara warga negara Muslim dan non-Muslim untuk mendukung Republik Indonesia. Sehingga pemikirannya dapat diaktualisasikan untuk kehidupan masyarakat modern.
- b. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa Indonesia hendaknya selalu mengawasi terkait dengan perkembangan bangsa. Maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus mengedepankan rasa keadilan dan masyarakat nyaman dengan kebijakan tersebut demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Pemikiran Nurcholish Madjid berhubungan dengan keadilan sosial masih perlu dibuktikan sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan untuk digunakan di masa depan.

C. Penutup

Demikian skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga karya ilmiah yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi peneliti agar menjadi teladan yang baik lagi di kehidupan kelak. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Zubair, Achmad Charris dan Bakker Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2009)
- Anwar, M. Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: 2002)
- Bakry, Noor Ms, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Darmadi Hamid, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Darmodiharjo Darjidan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apadan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Dipoyudo Kirdi, *Keadilan Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985)
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Depok, Gema Insani, 2015)
- Hari, Muhammad Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hatta Mohammad, *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2015)
- Herdiawanto Heri, dkk, *Kritis & Aktif Berwarga Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Herimantodan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982)
- Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Logung, 2004)

Kaelan, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2009)

_____, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004)

_____, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paramadina, 2005)

_____, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan Membahas Proses Reformasi*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998)

Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusamedia, 2014)

Kuntowijoyo, dkk. *Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana* (Jakarta: Paramadina, 2003)

Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Latif Yudi, *Revolusi Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2015),

L. Carter Stephen. *Integritas*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999)

Madjid Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

_____, *Indonesia kita*, (Jakarta: Paramadina, 2004)

_____, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta, Paramadina, 2007)

_____, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)

_____, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008)

_____, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013)

_____, *Tradisi Islam, PerandanFungsinyadalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008)

Magnis Franz Suseno, *Kuasadan Moral*, (Jakarta, Gramedia, 1986)

Mahfud MD, *PerdebatanHukum Tata Negara PascaAmandemenKonstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: SekretariatJendral MPR RI, 2013)

Nadroh Siti, *WacanaKeagamaan Dan PolitikNurcholishMadjid*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1999)

Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013)

PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional, *KamusBesarBahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 1988)

Rachman,BudhyMunawar, *MembacaNurcholishMadjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011)

RaharjoSatjipto, *HukumDalamJagatKetertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006)

RahmanFazlur, *MetodedanAlternatif Neo Modernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992)

RawlsJhon, *TeoriKeadilan*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011)

RI PBDPN , *Kamus BesarBahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003)

Saridjo Marwan, CakNur: *di AntaraSarungdanDasi&MusdahMuliaTetapBerjilbab*(Jakarta: YayasanNgaliAksara, 2005)

ShadilyHasan, ct. Al, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 5, IchtiarBaru Van Hocvc, Jakarta, 1984.

SiswantoJoko, *Pancasila, RefleksiKomprehensif Hal-ihwalPancasila*,
(Yogyakarta: Ladang kata, 2015)

Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*,(Yogyakarta:
Lukman Offset, 1999)

Sugiono, *MetodelogiPenelitianKuantitatifKualitatifR dan D*,
(Jakarta:Alfabeta,2005)

Sutrisno Slamet, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. (Yogyakarta: Andi, 2006)

Syafi'i Ahmad, *Islam dalamBingkaiKeindonesiaandanKemanusiaan:
SebuahRefleksiSejarah*, (Bandung: Mizan, 2009)

Taufik akhmad, *SejarahPemikiranTokohModernisme Islam* (Jakarta: Raja
GrafindoPersada, 2005)

YayasanPembela Tanah Air, *SejarahlahirnyaPancasila*, (Jakarta Pusat: Yapeta,
1995)

